



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2017/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SU'ADI
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 455605

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.025.092.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/96 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 197.260.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/600 m2 di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 639.828.000
3. Tanah Seluas 44.685 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI
Rp. 46.850.000
4. Tanah Seluas 749 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp.
42.240.000
5. Tanah Seluas 1.553 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
1.090.206.000
6. Tanah Seluas 622 m2 di KEBUMEN, WARISAN Rp. 8.708.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 377.500.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000



5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	302.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	340.000.000
Sub Total	Rp.	3.044.592.000
III. HUTANG	Rp.	804.755.412
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.239.836.588

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.